

**Peranan Kinerja Anggota Suku Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan di Jalan Raya Ciledug Pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan**

**Paiman Raharjo**

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

**Email : paimanraharjo@dsn.co.id**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan di Jalan ciledug raya mulai dari Kebayoran lama, seskoal, cipulir, ulujami, pesanggrahan, sampai dengan diperbatasan kota tangerang . key informan sendiri terdiri dari petugas dishub jakarta selatan, masyarakat dan supir angkutan umum yang sehari-hari melintasi daerah jalan ciledug raya.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan kinerja petugas dishub Jakarta selatan dalam mengatasi kemacetan di wilayah jalan ciledug raya. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Fokus penelitian yang pertama yaitu mengenai peranan kinerja yang dilakukan petugas dishub dalam melaksanakan peranan dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang ada. Dimana petugas dishub yang bertugas harus menjalankan beberapa peranan dan tupoksi yang ada diantaranya yaitu sebagai mengatasi kemacetan di daerah tersebut*

*Responsivitas, responabilitas dan akuntabilitas yang dimiliki oleh para petugas harus dijalankan dan dilaksanakan sebaik mungkin guna mengukur kinerja mereka terutama dalam mengatasi kemacetan di jalan ciledug raya. Hal ini yang pula yang akan menunjukkan pelayanan para petugas kepada masyarakat khususnya yang melewati dan menggunakan jalan raya ciledug sebagai sarana dan prasarana transportasi yang disediakan dari dinas perhubungan yang ada.*

*Hasil yang didapatkan adalah bahwa peranan kinerja dari anggota dinas perhubungan belum berjalan dengan baik dan optimal. Dimana masyarakat kurang merasakan keberadaan dari anggota dishub Jakarta selatan dalam berupaya mengatasi kemacetan yang ada dan timbul. Perlunya beberapa evaluasi yang perlu dilakukan terhadap penugasan anggota dishub Jakarta selatan dalam mengatasi kemacetan dan evaluasi kebijakan yang ada di suku dinas perhubungan Jakarta selatan*

**Kata Kunci:** Peranan Kinerja, Suku Dinas Perhubungan, Mengatasi Kemacetan

## ABSTRACT

*This research was conducted at Jalan Ciledug raya starting from old Kebayoran, seskoal, cipulir, ulujami, pesanggrahan, up to the border of tangerang city. key informant itself consists of officer dishub south jakarta, community and driver of public transportation everyday dug road ciledug raya.*

*The research was conducted to analyze the attitude of dishub in South Jakarta in overcoming traffic jam in Ciledug Raya highway area. This research uses Qualitative method. The first focus of research is on the role of performance performed by officers in running the role and responsibilities in accordance with existing tupoksi. Where officers dishub who must run some roles and tupoksi that there is valid that is to overcome the congestion in the area*

*The responsiveness, responsiveness and accountability that officers have must be implemented and implemented as best as possible in order to measure their performance in overcoming congestion on the highway road. This matter which will show service of officer to society specially passing and using ciledug highway as facility and prasana of transportation which is provided from transportation department existing.*

*The result is the role of the members of the transportation service has not been running properly and optimally. Where the people lack the feel of the members of dishub south of Jakarta in the development of existing and arising congestion. The need for several evaluations that need to be done on the assignment of members of dishub south of Jakarta in overcoming the congestion and evaluation of policies that exist in the tribe of transportation south Jakarta*

## PENDAHULUAN

Sebagai daerah dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, menjadikan Jakarta Selatan merupakan salah satu daerah Favorite dari para pekerja yang berada di Jakarta untuk memilih tempat tinggal berada di Jakarta Selatan. Jumlah mobilitas penduduk tiap tahunnya di Kota administrasi Jakarta Selatan mengalami peningkatan yang cukup besar. Ini dilihat dari beberapa aspek yang ada seperti, jumlah Perumahan yang berada di Jakarta Selatan yang terus bertambah, jumlah kendaraan pribadi atau umum yang meningkat, dan jumlah dari kantor-kantor yang berada di Jakarta Selatan.

Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar kota. Hal ini memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya di bidang angkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk.

Dengan mobilitas penduduk di Jakarta Selatan yang cenderung meningkat harus sebanding dengan jumlah pembangunan pula yang berada di Kota administrasi Jakarta Selatan. Hal ini guna

mengakomodir segala kebutuhan dari masyarakat yang berada di Jakarta selatan yang sedang beraktivitas.

Transportasi itu sangat dituntut peranannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia. Sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana.

Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi di perkotaan meningkat pula, sehingga menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan yang sesegera mungkin.

Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum,

pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas.

Di samping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan

dimanfaatkan sehingga mampu terjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan model transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudi, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan,

Koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Oleh karena itu, Peranan kinerja Suku Dinas Perhubungan Kota administrasi Jakarta Selatan sangat strategis sebagai salah satu stakeholder dalam mengurai permasalahan kemacetan yang terjadi, dan merupakan badan atau organisasi yang melaksanakan tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perhubungan.

Suku Dinas Perhubungan Kota administrasi Jakarta Selatan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah di Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam mewujudkan pelayanan yang aman, nyaman, lancar dan terjangkau oleh publik yang mempunyai mobilitas tinggi, hal ini pula perlu didukung dengan perencanaan yang matang.

Kondisi Kota administrasi Jakarta Selatan, terutama pada jalur Ciledug raya yang menghubungkan wilayah Jakarta Selatan dan wilayah ciledug tangerang yang pada akhir-akhir ini mulai mengalami masalah terkait kelancaran arus lalu lintas, hal ini di akibatkan oleh jumlah kendaraan yang semakin meningkat, ketersediaan ruas

jalan yang tidak memadai, kondisi jalan yang rusak.

Kemudian pemberian izin trayek angkutan umum yang tidak dibatasi (tidak disesuaikan dengan jumlah pengguna jasa angkutan), parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan, pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan bahu jalan (trotoar), banyaknya median jalan yang diperuntukan untuk jalur memutar kendaraan yang kurang tepat dan berbagai permasalahan lalu lintas yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi instansi terkait, penegakan peraturan yang kurang maksimal, rendahnya kesadaran dari pengguna dan pemberi jasa. Sebagai contoh permasalahannya yang ada yaitu, tingkat kemacetan yang timbul di daerah ciledug sudah tidak mengenal waktu lagi, bila dahulu jam-jam kemacetan timbul di waktu-waktu tertentu seperti jam sekolah masuk atau keluar, hari-hari libur nasional, dan juga bila adanya acara-acara yang menggunakan jalan sebagai wadah dalam kegiatannya.

Tetapi sekarang hampir tidak bisa ditebaknya kemacetan yang timbul di

daerah Jalan Ciledug raya. Sebagai contoh lain, pembangunan yang seharusnya bertujuan untuk mengurai kemacetan di daerah ciledug dan merekayasa lalu lintas yang ada di daerah ciledug justru sekarang ini malah menjadi sumber kemacetan baru yang ada. Dalam hal ini pembangunan jalan non-tol jalur transjakarta yang mengurai volume jalan yang ada di jalan ciledug raya yang mengakibatkan hanya dapat di lewati oleh 1 mobil sehingga mobil lain yang ingin mendahului tidak dapat berjalan.

Sebagai contoh terakhir, pengadaan lampu lalu lintas yang berada di daerah ciledug raya. Lampu merah berada di setiap pertigaan besar yang ada di daerah ciledug, akan tetapi efektifitas dari lampu merah tersebut seakan tidak mempunyai arti yang berlebih dalam mengurangi kemacetan.

Setelah hitungan 2 bulan dari pemasangan lampu lintas tersebut, lampu lalu lintas tersebut tidak berfungsi seolah hanya menjadi pajangan saja. Seperti lokasi yang berada di jalan raya ciledug yang berada di bawah jalan Tol JORR yang melintasi jalan Ciledug raya. Tidak hanya itu banyak pengguna motor yang melakukan melawan arus yang berada di wilayah tersebut dan juga di wilayah Pasar Cipulir

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian mengenai peranan kinerja anggota suku dinas perhubungan dalam mengatasi kemacetan di jalan raya ciledug pada wilayah kota administrasi Jakarta Selatan sehingga pada akhirnya tugas dari pelaksanaan tugas pokok dinas perhubungan itu akan tercapai dan memberikan tingkat pelayanan terhadap masyarakat kota administrasi Jakarta Selatan. dan pada bagian akhir ini akan di berikan simpulan umum pembahasan ini.

## LANDASAN KONSEPTUAL

### 1. Pengertian Administrasi

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia.

### 2. Pengertian Manajemen

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2000:95) , dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar-Dasar dan Kunci

Keberhasilan” adalah manajemen sumber daya manusia adalah seni dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan dan masyarakat.

### 3. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia,

Menurut Basir Barthos (2001:1) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, mengemukakan pendapat bahwa: “Manajemen sumber daya manusia mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Sedangkan Manajemen Personalia mencakup sumber daya manusia yang berada dalam perusahaan-perusahaan modern yang dikenal dengan sektor formal”.

### 4. Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Unit sosial ditandai oleh : perencanaan yang sampai tingkat tertentu disusun secara sadar (misalnya : anggaran belanja keluarga), pusat-pusat kekuasaan (misalnya: kepala suku ), serta oleh sistem

keanggotaan yang dapat diganti (misalnya: melalui perceraian).

### 5. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

### 6. Pengertian kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pencapaian kinerja dalam suatu lembaga instansi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) sering diukur dari sudut pandang masing-masing stakeholders, misalnya lembaga legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

### 7. Manajemen Kinerja

menurut Moeheriono (2012:69) manajemen kinerja instansi pemerintah adalah Sebagai suatu sistem, membutuhkan suatu proses yang sistematis sehingga perlu dibuat desain sistem manajemen kinerja yang tepat

untuk mencapai kinerja optimal. Sistem merupakan serangkaian prosedur, langkah atau tahap yang tertata dengan baik. Dengan demikian juga sistem manajemen kinerja organisasi publik/instansi pemerintah mengandung prosedur, langkah dan tahapan yang membentuk suatu siklus kerja.

#### 8. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu.

#### 9. Pengertian Masyarakat

Menurut Anicun Aziz dan Hartono, yang dimaksud dengan masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat.

#### 10. Pengertian kemacetan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) definisi kemacetan ialah tidak dapat bekerja dengan baik, tersendat, seret, terhenti dan tidak lancar. Selain itu, Hoeve

(1990) juga mengatakan bahwa “Kemacetan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan dan kepadatan penduduk” sehingga arus kendaraan bergerak sangat lambat.

#### 11. Pengertian Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain.

#### 12. Pengertian Transportasi

Transportasi adalah pemindahan manusia, hewan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia dan atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari, abbas salim (1993:6).

### METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian mengenai peranan kinerja anggota suku dinas perhubungan dalam mengatasi kemacetan

di jalan raya ciledug pada wilayah kota administrasi jakarta selatan

Maka penulis menggunakan metode penelitian yang menggunakan rancangan atau desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengukur peranan kinerja anggota suku dinas perhubungan dalam mengatasi kemacetan di jalan raya ciledug pada wilayah kota administrasi jakarta selatan .kemudian agar penelitian ini mendekati kondisi yang sebenarnya,maka hasil pengukuran yang telah dilaksanakan akan dilengkapi dengan pendapat-pendapat yang lebih komprehensif melalui indepth interview dari para responden. Untuk mengumpulkan data yang baik, akurat, tepat, dan relevan serta sesuai dengan dengan kebutuhan penelitian, maka penulis menggunakan metode wawancara kepada informan yang telah penulis tetapkan dengan panduan wawancara yang sesuai dengan aspek yang diteliti dan studi dokumentasi

Wawancara adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan panduan wawancara dengan melakukan tanggung jawab secara langsung dengan responden atau informan yang telah penulis tetapkan

Untuk menentukan informan yang baik penulis harus mengenal tempat serta

tugas-tugas yang ada ditempat penelitian. Informan yang baik dan berkualitas adalah orang-orang yang merasakan secara langsung pemberian motivasi di tempat penelitian. Studi Dokumentasi adalah mencari data dengan mempelajari dokumen yang relevan. Melalui penelitian ini maka penulis mencari data-data yang sesuai dengan kebutuhan penulis.e.

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data dilakukan secara keseluruhan dan sistematis bersamaan dengan pengumpulan data berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti

Menurut soetrisno dan hanafie (2007:166) mengemukakan bahwa tahap analisis data adalah bagaimana agar segala kegiatan yang dilakukan itu valid dan reliable, sehingga ilmu hasil penelitian itu mencapai tingkat kebenaran yang tinggi ata sebagai ilmu yang terandalkan.

Dari uraian diatas dalam pelaksanaan penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul dari hasil wawancara secara langsung kepada informan. Untuk menjawab pernyataan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang telah dilakukan proses analisis di sajikan dalam bentuk

narasi dan kutipan-kutipan langsung dengan berdasarkan hasil wawancara kepada informan.

## PEMBAHASAN

Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Berada Jl. Mt. Haryono Kav.45-46, Jakarta Selatan, Rt.3/Rw.3, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770, Indonesia.

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian lalu lintas angkutan jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai daerah yang berada di wilayah Administrasi Kota Ibu Kota.

Jakarta Selatan merupakan wilayah cakupan yang merasakan pelayanan dari Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan itu sendiri. Wilayah Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan yang tergabung dalam 1 walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, Jagakarsa, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, Setiabudi

Setiap organisasi yang di bentuk tentunya memiliki visi, misi dan tupoksi yang dibuat guna menentukan arah dan tujuan yang di tentukan dan juga menentukan cara-cara yang di buat untuk mencapai tujuan tersebut. Dibawah Dinas perhubungan DKI, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan melaksanakan setiap kebijakan dan melakukan nya sesuai dengan ketetapan yang dibuat serta melaporkannya kepada kementerian perhubungan.

Oleh karena itu suku Dinas perhubungan jakart selatan sendiri mempunya tugas pokok dan fungsi yang dibuat guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan dan mempunyai nilai pelayanan terhadap masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok yang ada didalam suku Dinas perhubungan DKI dalam melayani masyarakat Jakarta. Suku dinas Jakarta selatan memiliki salah satu fungsi antara lain yaitu

Pelaksanaan kegiatan lalu lintas, Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional, penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi, pembangunan dan

pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;

maka dari inilah bisa di lihat Peranan Kinerja Anggota Suku Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Jalan Raya Ciledug Pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh, Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalulintas ,Masyarakat merupakan warga negara yang harus merasakan fungsi dari pelayanan masyarakat yang di lakukan oleh pihak Sudin Perhubungan Jakarta Selatan. Sebagai objek yang di layanin, masyarakat harus mendapatkan rasa pembinaan, pembangunan, pengelolaan khususnya di wilayah Jakarta Selatan di wilayah ciledug sesuai dengan tugas Sudin perhubungan Jakarta selatan. Tidak hanya itu sebagai petugas yang ditunjuk oleh negara dalam pembinaan, pembangunan, pengelolaan dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, para petugas perhubungan Dishub senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan tanpa mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi peraturan yang berlaku

guna menghindari kesalahan dalam bertugas di lapangan.

Sebagai aparaturnya yang telah bersedia yang ditunjuk sebagai petugas yang mempunyai tugas pokok pembinaan, pembangunan, pengelolaan, para petugas harus dengan bersedia melayani masyarakat, tidak dilihat dari status dan kastanya, karena semua memiliki kesamaan di mata negara dan di atur oleh perundang-undangan tanpa terkecuali.

Untuk menunjang kelancaran dalam menjalankan tugas di masyarakat, oleh karena itu diperlukan petugas Dishub yang memiliki dan mengerti keterampilan dalam tugas dan fungsi nya. Dengan kata lain di dukung dengan kemampuan yang dapat diandalkan, akurat dan konsisten dalam menjalankan tugas serta keterampilan dalam menjabarkan segala sarana dan prasana yang berada di lapangan.

Petugas Sudin Dishub Jakarta Selatan harus memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas yang telah diberikan sesuai dengan unit masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing. Selain itu para petugas Dishub harus konsisten dengan tugas pokok dan jadwal masing-masing unit, sehingga dalam proses pencapaian pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian

dan pengkoordinasian lalu lintas dapat dirasakan oleh masyarakat.

Semangat dari Paradigma baru UU No. 22 tahun 2009 ini adalah bahwa penyelenggaraan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait dengan kata lain bahwa instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan lebih bersifat kebersamaan dimana ada 5 instansi terkait sebagai pembina penyelenggaraan

Dalam pelaksanaannya pembina penyelenggaraan terdiri dari 5 instansi dan dikoordinasikan melalui Forum LLAJ bersama dengan akademisi dan masyarakat. Instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk ruang lingkup penyelenggaraannya berdasarkan UU No 22 tahun 2009 diatur dalam pasal 5 sampai dengan 13.

Dalam Responsibilitas menjelaskan bahwa sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit maupun yang eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan

kebijaksanaan organisasi maka kinerjanya dinilai semakin baik.

Hal ini dapat di lihat dari mana Sudin perhubungan Jakarta selatan yang menjalankan pelaksanaan kegiatan organisasinya dan di lakukan sesuai dengan prinsip atau fungsi yang ada di masing-masing bagian yang dalam hal ini tentunya bertugas dalam mengatasi kemacetan yang ada di jalan ciledug raya Jakarta selatan sesuai dengan lingkup kerja dari sudin perhubungan Jakarta selatan.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan fungsi dari suku dinas perhubungan yang ada mengenai penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi dan Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional. Dalam hal ini penulis melihat peranan kinerja anggota dishub dalam mengatasi kemacetan yang ada di jalan raya ciledug Jakarta selatan dari segi resposivitas yang ada sesuai dengan prosesnya yang ada dalam suku dinas perhubungan Jakarta selatan.

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Atau pun sebaiknya responsivitas yang tinggi merupakan keselarasan antara pelayanan akan kebutuhan masyarakat yang ada dalam hal ini adalah mengatasi kemacetan yang ada di jalan ciledug raya Jakarta selatan. Dengan Hal tersebut jelas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Tidak hanya itu dalam akuntabilitas terdapat Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

## KESIMPULAN

Bila dilihat dari penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang penulis sampaikan adapun faktor-faktor penghambat peranan kinerja anggota Dinas Perhubungan Jakarta selatan dalam pembangunan mengatasi kemacetan di jalan raya ciledug raya adalah

Keterbatasan SDM terutama yang ada guna mengatur dan mengatasi kemacetan di wilayah Jakarta selatan, Prasarana dan fasilitas perhubungan masih sangat minim dan banyak terdapat fasilitas perhubungan yang mengalami kerusakan, Masih rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur perhubungan dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan, Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas, Koordinasi yang harus ditingkatkan guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut, Perbandingan antara kemampuan penambahan ruas jalan dengan laju

pertambahan kendaraan bermotor di jalan raya ciledug yang tidak seimbang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abbas salim, h.a. 1993. Manajemen transportasi, rajawali pers, jakarta

Basir barthos, manajemen kearsipan untuk lembaga negara, swasta dan. Perguruan tinggi. Jakarta : pt. Bumi aksara, 2002

Handyaningrat, s. (1993). Pengantar studi ilmu administrasi dan Manajemen. Jakarta: cv. Haji mas agung.

Hasibuan s.p , malayu (2006) manajemen dasar, pengertian, dan masalah. Cetakan 4 , jakarta – bumi aksara

Moeheriono. 2012. “pengukuran kinerja berbasis kompetensi”. Jakarta: raja,

Grafindo persada

Moeherioni, 2012, perencanaan, aplikasi dan pengembangan indikator kinerja

Utama bisnis dan publik, rajawali pers: jakarta

Mufiz, ali. 2009.. Pengantar ilmu administrasi negara edisi i. Universitas

Terbuka.jakarta

Soekanto, soerjono, 2002, teori peranan, jakarta, bumi aksara

Siagian, p.sondang ( 2004), administrasi pembangunan, jakarta : pt gunung

Agung.

Handoko, t. H. (1999). Manajemen. Yogyakarta: bpf.

#### Dokumen

- Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009tentang lalu lintas dan angkutan jalan